



Kemerdekaan yang Belum Selesai



Dinar W, Krjogja - Senin, 17 Agustus 2026 | 20:26 WIB



KRjogja.com – PADA 17 Agustus 2026, Pemerintah mengangkat tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Di dalamnya terkandung tiga janji **kemerdekaan** yang perlu diuji secara jujur: apakah kita benar-benar berdaulat, apakah keadilan telah dirasakan semua orang, dan apakah kemakmuran telah menjangkau seluruh rakyat?

Merdeka dari kemiskinan

Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun dari 8,25 persen pada September 2025 (BPS, 2026). Penurunan ini tentu patut dihargai. Akan tetapi, angka tersebut juga mengingatkan bahwa jutaan warga Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.

Masih banyak orangtua yang harus memilih antara membeli beras atau obat, petani yang hasil panennya tidak sebanding dengan biaya produksi, dan buruh yang sebagian besar pendapatannya habis untuk biaya tempat tinggal dan transportasi.

Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari berapa banyak orang yang berhasil melewati garis kemiskinan. Kita juga harus bertanya: apakah mereka telah memiliki kehidupan yang layak, perlindungan sosial yang kuat, dan kesempatan untuk memperbaiki masa depan?

Kemerdekaan kehilangan makna apabila seseorang masih belum bebas dari kemiskinan.

Bekerja tanpa benar-benar sejahtera

BPS melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen. Pada saat yang sama, rata-rata upah buruh tercatat sekitar Rp3,29 juta per bulan (BPS, 2026b). Angka pengangguran memang menurun, tetapi tantangan ketenagakerjaan tidak berhenti pada tersedia atau tidaknya pekerjaan.

Tidak sedikit warga bekerja tanpa kepastian kontrak, perlindungan kesehatan, jaminan hari tua, keselamatan kerja, atau pendapatan yang memadai. Mereka bekerja, namun setiap bulan tetap mencemaskan biaya sekolah, sewa rumah, cicilan, dan kebutuhan pangan.

Negara harus memastikan adanya pekerjaan bermartabat yang memungkinkan manusia hidup, bertumbuh, dan merencanakan masa depan.

Keadilan yang tidak boleh menjadi kemewahan

Tema keadilan menggugah kesadaran kita tentang ketimpangan. Ketimpangan bukan hanya perbedaan pendapatan, melainkan juga menyangkut perbedaan kesempatan untuk memperoleh kualitas sekolah, layanan kesehatan, akses internet, transportasi, dan kesempatan ekonomi yang setara.

Keadilan juga diuji melalui penegakan hukum. Kemerdekaan akan terasa rapuh ketika masyarakat menganggap hukum tegas terhadap mereka yang lemah, tetapi mudah dinegosiasikan oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan.

Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Kritik tidak boleh dibalas dengan intimidasi. Kekuasaan harus dapat diawasi. Aparat dan lembaga peradilan harus bekerja secara profesional, independen, dan transparan. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan terus terkikis.



Add as a preferred
source on Google

Halaman:

1

2

Selanjutnya

Korupsi merampas kemerdekaan

Persoalan lain yang tidak dapat disembunyikan adalah korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 berada pada skor 34 dari 100, turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya (KPK, 2026). Sementara itu, Survei Penilaian Integritas 2025 menghasilkan skor nasional 72,32 dan masih menempatkan integritas sektor publik dalam kategori rentan (KPK, 2026).

Korupsi bukan sekadar peristiwa penangkapan pejabat koruptor. Korupsi membawa dampak langsung: ruang kelas yang rusak, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, banyak jalan-jalan yang rusak, dan bantuan yang dipotong. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah bagian dari kemerdekaan rakyat yang dirampas.

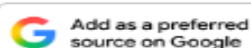
Merawat Republik

Merayakan kemerdekaan berarti memikul tanggung jawab bagi setiap generasi untuk menentukan ke mana bangsa ini berjalan.

Pemerintah bertugas mengelola kekuasaan dengan jujur dan menghadirkan pelayanan yang adil. Dunia usaha harus menciptakan kesejahteraan tanpa mengeksploitasi pekerja maupun lingkungan. Perguruan tinggi dan media perlu menjaga nalar kritis. Masyarakat pun harus berani memeriksa informasi, menghormati perbedaan, membayar kewajiban, serta menolak korupsi mulai dari lingkungan terdekat.

Indonesia belum selesai. Namun, ketidaksempurnaan bukan alasan untuk kehilangan harapan. Kemerdekaan adalah panggilan untuk bekerja lebih jujur, lebih adil, dan lebih berani.

Kemerdekaan sejati baru tercapai ketika tidak ada warga yang merasa menjadi orang asing di negerinya sendiri. (Bernardus Agus Rukiyanto, Dosen Universitas Sanata Dharma)



Halaman: 1 2 Sebelumnya

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.